

RENCANA SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI DALAM MENENTUKAN TUJUAN PEMERINTAHAN

Oleh :

Latifah Amir¹

ABSTRACT

According to Prayudi Administrative law is the laws that govern the inside and outside of state administration and created by the administrator. So based on the definition given by Prayudi administrative law is made by the government from the central government to local governments to create or make ordinary administrative law, the laws and programs that arise from various sources of law.

Sources of administrative law are written and there are no written, one of the sources of administrative law that is written is the plan.

According to some experts think the state administrative law, among others, Ten Berge stated plan in the perspective of administrative law is written by an organ of government actions aimed at the future in the form of actions or decisions that have properties that are not kind / variety of existing inter-linkages for a specified period. Hence in the preparation of plans by both central and local government should be based on legislation and the principles of good Governance.

Keywords: Legal protection

I. LATAR BELAKANG

Negara merupakan organisasi yang memiliki tujuan . bagi Indonesia tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yang mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan selain harus berorientasi kepada tujuan , juga harus menjadikan hukum sebagai aturan kegiatan kenegaraan , pemerintah dan kesejahteraan.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Menurut Philipus pada negara hukum kemasyarakatan modern, rencana selaku figur hukum dari hukum administrasi tidak dapat lagi dihilangkan dari pemikiran . rencana dijumpai pada pelbagai kegiatan pemerintahan , misalnya pengaturan tata ruang, pengurusan kesehatan dan pendidikan dan juga dalam penyusunan anggaran. Belinfante yang dikutip Philipus, rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib / teratur.

Jadi untuk terlaksananya kegiatan dalam menentukan tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti hukum administrasi, karena suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu.

Berkaitan dengan defenisi dari rencana (*planning*) menurut Syafrudin yang mengutip dari Rade and de Smit merangkup beberapa defenisi rencana anantara lain, perencanaan adalah member bentuk kepada situasi yang akan datang, untuk mencapai hal tersebut harus dirinci secara jelas keinginan yang ada serta serta harus ditetapkan sasaran yang dikehendaki, jadi dengan demikian harus dirumuskan problema yang bersangkutan dengan hal itu. Menurut Bulthuis yang dikutip oleh Van Wijk , menyatakan rencana dapat digunakan sebagai sarana untuk mengsinkronisasikan berbagai rencana kebijakan pemerintah. Van de Haan berpendapat melalui rencana, pemerintah mencoba menyelaraskan kebijakan antar lembaga- lembaga pemerintahan dan badan badan hukum public yang sifatnya saling terkait.²

Salah satu fungsi hukum menurut Sjachran Basah, adalah *direktif* yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara dengan menjadikan hukum administrasi negara sebagai

² Riawan Tjandra . *Hukum Administrasi Negara* Penerbit Universitas Atmajaya, Yoyakarta, 2008, hal.23.

aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pengaturan tujuan yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Rencana yang dimaksudkan disini adalah rencana dalam perspektif hukum administrasi negara atau rencana yang dibuat oleh hukum administrasi negara sebagai salah satu instrument pemerintahan. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka tulisan ini penulis beri Judul “ Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintah.”

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas yang menjadi latar belakang penulisan ini, untuk membatasi permasalahan yang akan ditulis selanjutnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Unsur-unsur apa yang terkandung dalam rencana sebagai instrumen hukum administrasi negara ?
2. Bagaimana karakter hukum dari rencana ?

III. PEMBAHASAN

1. Unsur- Unsur Yang Terkandung Dalam Rencana

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam setiap bentuk organisasi. Dengan kata lain setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana. Dalam perspektif hukum administrasi negara J.B.J.M. ten Berge yang di kutip oleh Ridwan, mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai berikut ;

a. Schriftelijke Presentatie (gambaran tertulis)

Dalam hukum administrasi, rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam , kebijakan,keputusan-keputusan dan sebagainya secara berkesinambungan.

Rencana terutama ditujukan untuk mengkomunikasikan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, yang disajikan secara tertulis sehingga dapat dilihat dan dibaca.

b. *Besluit of handeling* (keputusan atau tindakan)

Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan . Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang, pada wewenang yang diberikan untuk itu, oleh karena itu susunan perencanaan itu biasanya berbentuk keputusan (*besluit*). Sedangkan rencana yang berupa informasi program kerja hanyalah berbentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan dimasa mendatang, oleh karena itu rencana seperti ini dikategorikan sebagai suatu tindakan.

c. *Bestuurorgaan* (Organ Pemerintahan)

Sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta , organisasi swasta , organ kehakiman, pembuat undang-undang dan sebagainya. Bagi hukum administrasi negara perhatian hanya ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh porgan pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarakan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu.

d. *Op de toekomst gericht* (ditujukan pada masa yang akan datang)

Dalam hal ini unsur rencana hanya dibicarakan pada kegiatan yang ditujukan pada masa yang akan datang. Perencanaan dibuat berdasarkan pandangan masa depan dari pemerintah. Perencanaan dijelaskan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaanya.

e. *Planenelementen* (elemen- elemen rencana)

Pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif, indikatif atau operasional , biasanya didalamnya terkandung informasi, rencana kebijakan yang akan ditempuh terutama dalam bentuk peraturankebijaksanaan atau persetujuan kebijaksanaan, pedoman-pedoman , peraturan umum,keputusan kongkrit yang berlaku umum.

f. *Ongelijksoortig character* (memiliki sifat yang tidak sejenis,beragam)

Berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama . sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau keadaan yang tidak sama.

g. *Samenhang* (keterkaitan)

Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis, misalnya pada penataan ruang bagi masyarakat, yang didalamnya terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan tata ruang.

h. *Al dan niet voor een bepaalde duur* (untuk waktu tertentu)

Kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas. Biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu seperti rencana tahunan, lima tahun dan sebagainya. Jarang rencana yang tidak memiliki batasan waktu. Kalaupun peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, organ pemerintahan bberwenang untuk menentukan rencana berdasarkan periode.

2. Karakter Hukum Rencana Dalam Hukum Administrasi Negara

Undang-undang , adalah salah satu sumber huku administrasi yang bentuknya tertulis hasil produk legislative (DPR) dengan Executif (Presiden /Pemerintah). Apabila rencana itu yang bersifat nasional harus dituang dalam bentuk Undanng-Undang. Apabila rencana itu dibuat oleh pemerintah daerah harus dituang dalam Peraturan Daerah setempat.

Rencana yang sifatnya nasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dituang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut Pasal 2 ayat (3) UUSPPN mengatur bahwa Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara , yang terdiri dari :

1. Asas Kepastian Hukum, asas dalam Negara hokum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan.
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan ,keserasian, dan keseimbangan dalam penegndalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum, asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia.
5. Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesional, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum terutama hukum administrasi. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian / Lembaga, baik Pusat maupun Daerah sesuai dengan asas dalam penyusunan rencana tersebut berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja oleh Kementerian / Lembaga baik Pusat maupun Daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, dan ukuran sesuai dengan jangka waktu sebuah rencana.

IV. KESIMPULAN

1. Rencana yang disusun oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai arahan pembangunan yang merupakan tujuan pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi mengandung unsure-unsur sebagai berikut ;
 1. *Schriftelijke* (tertulis)
 2. *Beluit of handling, inhoudende een keuze* (keputusan atau tindakan)
 3. *Door een bestuurorgaan* (oleh organ pemerintah)
 4. *Van op de toekomst gerichte* (ditujukan pada waktu yang akan datang)
 5. *Van een ongelijksoortig karakter* (memiliki sifat yang tidak seragam, / sejenis).
 6. *Samenhang* (keterkaitan seringkali secara pragmatis).
 7. *Al dan niet voor een bepaalde duur* (untuk jangka waktu tertentu)

2. Karena proses perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembnetukan kebijaksanaan yang dinyatakan dalam hubungan timbale balik antara kebijaksanaan dengan hokum proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hokum. Menurut UUSPPN maka sistim perencanaan pembangunan nasional harus berdasarkan Asas-asas Penyelenggaraan Negara, karena asas ini juga termasuk kepada sumber hokum administrasi negara yang tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , Penerbit Gadjah Mada University Press, 1996 Yogyakarta

Ridwan ,HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit, UII Pres, 2002 ,Yogyakarta

Riawan Tjandra . *Hukum Administrasi Negara* Penerbit Universitas Atmajaya, 2008 Yogyakarta